



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu untuk menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;
- b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lenibaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

#### **Pasal 1**

*Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara tahun 2015-

**Pasal 2**

*Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2015

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1108

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAG HUKUM DAN ORGANISASI,

RUSMA DWIYANA

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN**  
**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2015**  
**TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019**

**PENDAHULUAN**

Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) disusun dengan mempertimbangkan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang bersifat jangka panjang, yang perlu dilakukan secara sistematis dan terus menerus pada pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Perpres no 81 tahun 2010 memiliki pendekatan yang lebih komprehensif menitik beratkan pada delapan area perubahan yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan, pengawasan, dan pola pikir dan budaya kerja. Melalui delapan area perubahan yang ditetapkan pada birokrasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan pada tahun 2025 dapat tercapai visi RB yaitu "terwujudnya pemerintah kelas dunia". Adapun yang dimaksud pemerintah kelas dunia disini adalah "pemerintahan yang profesional dan berintegritas yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat". Untuk mencapai visi tersebut, Grand Design Reformasi Birokrasi menetapkan ada tiga sasaran yang hendak dicapai yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; kualitas pelayanan publik dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran ini merupakan aspek yang penting bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Selain itu, reformasi merupakan dimensi yang penting

meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Substansi RB dalam RPJMN kedua tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai prioritas nasional ke-1, yaitu RB dan tata kelola serta dimasukkannya ke dalam agenda pembangunan ke-2 yaitu perbaikan tata pemerintahan.

Terdapat berbagai capaian positif hasil dari program RB yang telah memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah. ( Ini antara lain perbaikan dalam manajemen SDM aparatur pemerintah, misalnya dengan adanya Rekrutmen CPNS yang transparan dan kompetensi CPNS yang jauh lebih baik serta Rekrutmen terbuka bagi jabatan-jabatan strategis di pemerintah mendapatkan kandidat terbaik untuk mengisi pimpinan tinggi. Meskipun masih terdapat banyak kelemahan, sistem administrasi kepegawaian juga dilaksanakan dengan lebih tertib dengan adanya instrumen-instrumen analisis jabatan dan diintegrasikan instrumen penilaian kinerja dan kehadiran pegawai yang lebih baik. Aspek positif lainnya adalah perbaikan kelembagaan adanya sejumlah perubahan organisasi di sejumlah instansi yang lebih efisien sesuai dengan tugas fungsinya. Dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran, program reformasi birokrasi mendorong terwujudnya integritas akuntabilitas yang lebih baik. Terkait dengan pelayanan publik, instansi pemerintah semakin didorong untuk responsive terhadap publik dengan menerapkan sistem pengaduan keluhan pelanggan, standar pelayanan publik, penggunaan e-gov di berbagai layanan transaksional dan proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Perbaikan pelayanan publik juga didukung perbaikan dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Reformasi birokrasi merupakan dimensi yang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Terlebih dalam era demokratisasi dan keterbukaan informasi yang semakin meningkat, akan memiliki ekspektasi atau tuntutan kepada pemerintah yang cenderung akan terus meningkat.

Sudah menjadi kewajiban setiap K/L untuk mendukung Reformasi Birokrasi tersebut, tak terkecuali LAN. Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) LAN 2010-2014 yang sudah berakhir, menjadikan keharusan penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) LAN 2015-2019. LAN menyusun road map reformasi birokrasi berdasarkan peta kebutuhan perubahan di LAN. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan. Pada intinya kegiatan-kegiatan dalam roadmap RB Map 2015-2019 ini memuat berbagai upaya untuk melaksanakan dan memperbaiki agenda perubahan LAN.

**AREA : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhas
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	E-service Bidang Diklat ***)						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan E-service Bidang Diklat : sistem informasi diklatpim dan diklat teknis yang terintegrasi, database alumni dan proyek perubahannya</li> <li>2. integrasi antara jadwal pelaksanaan diklat dengan pertanggung jawaban keuangan</li> <li>3. Pengembangan database widyaiswara . Monitoring dan evaluasi atas penerapan sistem</li> </ol>	Meningkatnya tingl kepuasan pelayan
2	ISO Diklat***)						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Pelaksanaan</li> <li>2. Sosialisasi dan Uji Coba</li> <li>3. Pelaksanaan, Monitoring/Evaluasi, dan Pengembangan</li> </ol>	Tercapainya ISO E
3	E-service STIA						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan E-service STIA</li> <li>2. Integrasi antara data mahasiswa di Akademis dan Keuangan</li> <li>3. Pengembangan Sistem pengelolaan piutang</li> <li>4. Penyusunan standar mutu pendidikan</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>	Meningkatnya ting kepuasan pelayar STIA
4	Penerapan Standar Pelayanan di setiap unit kerja						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Standar Pelayanan di setiap unit kerja dan menciptakan inovasi pelayanan</li> <li>2. Pelayanan satu pintu untuk diklat dan pelayan lainnya kepada stakeholder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Pelaya</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB as pelayanan pu</li> </ol>

							3. Membuat survey kepuasan pelanggan pada setiap pelayanan publik	
5	Complain handling						Complain handling di berbagai unit pelayanan : diklat, mahasiswa, WI, JFAK, dan lainnya	1. Seluruh aduan tertangani 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Keterangan :

= Tahun pelaksanaan

= Agenda Prioritas

#### AREA : MANAJEMEN PERUBAHAN

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan						1. Penguatan Tim RB sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala LAN Nomor 17/K.1/HKM.03.1/2014 2. Menyusun action plan pelaksanaan RB 3. Evaluasi Tim Manajemen perubahan dan pelaksanaan RB	1. Perbaikan budaya kerja organisasi 2. Peningkatan hasil evaluasi RB
2	Penyusunan Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi						1. Monitoring manajemen perubahan dan strategi komunikasi 2. Proses <i>Learning organization</i> : meliputi sharing knowledge, benchmarks, FGD, dan Bimtek.	1. Perbaikan budaya kerja organisasi 2. Peningkatan hasil evaluasi RB

								evaluasi RB
	Penguatan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka RB						Review penerapan nilai-nilai perubahan terhadap pola pikir dan budaya kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan budaya kerja organisasi</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB</li> </ol>
4	Internalisasi Nilai - nilai						Internalisasi Nilai -nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan budaya kerja organisasi</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB</li> </ol>

Keterangan :

= Tahun pelaksanaan

= Agenda Prioritas

**AREA : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penataan berbagai Per-UUan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh LAN						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proleg LAN (Diklat, Kajian, Inovasi, STIA)</li> <li>2. Review terhadap produk hukum LAN</li> <li>3. Penataan dokumentasi produk hukum yang telah diterbitkan</li> <li>4. Sistem Pengendalian penyusunan peraturan perundnag-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB asj penataan Peratu Perundang-</li> </ol>



4	Pembangunan/ pengembangan e- office						1. Monitoring/Evaluasi e-office/e-government di LAN 2. Penguatan implementasi e-office 3. Dukungan sarana/komputer Bimtek / kursus komputer	1. Perbaiki proses ker 2. Peningkatan hasil penil PeGI
5	Pengembangan e- government di LAN						Pengembangan e-government di LAN	1. Perbaiki proses ker 2. Peningkatan hasil penil PeGI

Keterangan :

= Tahun pelaksanaan

\*\*\* = Agenda Prioritas

**AREA : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penguatan Unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat						1. Penyusunan rencana aksi 2. Evaluasi dan monitoring 3. Reviu secara berkala	1. Perbaiki proses kerja 2. Peningkatan hasil evaluasi aspek penataan dan penguat organisasi

Keterangan :

= Tahun pelaksanaan

\*\*\* = Agenda Prioritas

**AREA : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

No	Program RB	Pe laksanaan					Kegiatan	Kriteria Keherhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Penataan Sistem Rekrutmen pegawai						Penyusunan rencana induk kebutuhan pegawai	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
2	Analisis dan Evaluasi Jabatan						Penyempnrrnaan anjab, ABK, Peta Jabatan, dan Job grading	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peninakatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan						Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
4	Assesment individu berdasarkan kompetensi						1. Assesment individu berdasarkan kompetensi (lanjutan, fungsional umum) 2. Memetakan hasil assesment	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
5	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu						1. Pengembangan sistem termasuk indikator penilaian 2. Menghubungkan system penilaian dengan SKP	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
6	Pengembangan data base pegawai						1. Pengembangan data base pegawai (sedang dilakukan) 2. Pengembangan SIMKA (sistem Informasi Kepegawaian)	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RE aspek penataan Sistem Manajemen SDM

7	Pengembangan Diklat Pegawai berbasis Kompetensi						TNA Pengembangan pegawai yang sudah terprogram sesuai kebutuhan kompetensinya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki manajemen kepegawaian</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM</li> </ol>
---	---	--	--	--	--	--	--	---

Keterangan :

Tahun pelaksanaan

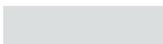
\*\*\* = Agenda Prioritas

**AREA : PENGUATAN PENGAWASAN**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberha
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan satgas SPIP pada setiap unit kerja</li> <li>2. Review perkalan nomor 19 tahun 2011 tentang pelaksanaan SPIP di LAN termasuk penyusunan petunjuk teknis penerapan SPIP di LAN</li> <li>3. Penilaian Resiko pada setiap unit kerja.</li> <li>4. Survey penerapan SPIP</li> <li>5. Melakukan piloting penilai resiko terhadap unit kerja tertentu yang dipilih</li> <li>6. Melakukan pemetaan lingkungan pengendalian di LAN</li> <li>7. Mengevaluasi dampak dari penerapan SPIP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini BPK WTP</li> <li>2. Peningkatan ha evaluasi RB aspek penguatan pengawasan</li> </ol>

2	Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat dan kegiatan sejenisnya</li> <li>2. Penguatan kapasitas jejaring kerja</li> <li>3. Peer Review / penelaahan sejawat, Survey Kepuasan stakeholder</li> <li>5. Audit Kinerja APIP oleh BPK</li> <li>6. Perluasan peran tidak hanya watchdog tetapi juga sebagai konsultan</li> <li>7. Asistensi penyusunan laporan keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen resiko dan konsultasi pengadaan barang dan jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini BPK WTP</li> <li>2. Peningkatan h evaluasi RB aspek penguatan pengawasan</li> </ol>
3	LAN yang bersih dan bebas KKN						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Eksternal Korupsi</li> <li>2. Penanganan Gratifikasi</li> <li>3. Pemantauan Penyampaian LHKPN</li> <li>4. Penyelesaian Kerugian Negara</li> <li>5. Pemantapan e-procurement</li> <li>6. Aksi PPK</li> <li>7. Penerapan Whistle Blower</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator capaian aksi PPK</li> <li>2. Perbaikan Sko survey eksternal korupsi</li> <li>3. Peningkatan h evaluasi RB aspek penguatan pengawasan</li> </ol>
4	Pengembangan Zona Integritas						Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan Sko survey eksternal korupsi</li> <li>2. Peningkatan h evaluasi RB aspek penguatan pengawasan</li> </ol>

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

\*\*\* = Agenda Prioritas

**AREA : Penguatan Akuntabilitas**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhas
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penguatan AKIP						Penguatan kapasitas pada unit kerja Evaluasi AKIP	1. Skor SAKIP 2. Peningkatan hasil eval aspek penguatan akun
2	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi						Pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi	1. Skor SAKIP 2. Peningkatan hasil eval aspek penguatan akun
3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)						Melakukan reviu IKU setiap tahun dan penetapan melalui Peraturan Kepala LAN 2. Internalisasi dan implementasi IKU 3. Reviu outcome 1. Evaluasi dampak penerapan IKU sebagai acuan bagi pencapaian target kinerja	1. Pebaikan kinerja LAN 2. Skor SAKIP 3. Peningkatan hasil eval aspek penguatan akun

Keterangan

= Tahun pelaksanaan

= Agenda Prioritas

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2015KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

AGUS DWIYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

RUSMA DWIYANA